

## POLITIK PEREMPUAN BERBASIS GENDER

**Luluk Dwi Kumalasari**

Dosen Universitas Muhammadiyah Malang  
email: [Lux\\_diva@Yahoo.com](mailto:Lux_diva@Yahoo.com)

### **Abstract**

The increasing number of women, who concern in politics and have sensitivity and awareness about the important of social relation, economics, law, culture issues among women and men will trigger gender equality in politics. However, it is not easy as imagined due to patriarchy concept on Indonesian women which have less access to gain high achievement in public sectors. On the other hand, the idealization of political participation of Indonesian women in political practices still not comparable to the number of Indonesian women. Therefore, women movement especially on politics, quality improvement through education, and support women to get excellent prestatation in front stage (public area), it is a effective way to give opportunity, appreciation and gender equality for women.

**Keywords:** Politics Representation, gender, sensitivity and awareness

## PENDAHULUAN

Profil perempuan Indonesia pada saat ini masih dihadapkan pada situasi yang dilematis. Di satu sisi perempuan di tuntutan untuk berperan dalam semua sektor kehidupan, tetapi di sisi lain muncul pula tuntutan agar perempuan tidak melupakan kodrat mereka sebagai perempuan. Jika kita melihat perempuan berkarir maka kita dapat melihat kesulitannya antara tuntutan berekspresi di ruang publik dan kungkungan opini bahwa karir seorang perempuan merupakan pintu masuk ketidakberhasilan rumah tangga, pendidikan anak, dan sebagainya.<sup>1</sup>

Kondisi perempuan yang masih memprihatinkan memang tidak lepas dari kondisi masyarakat Indonesia secara umum yang cukup lama mengalami kehidupan dalam kungkungan rezim otoriter. Hanya dalam penggalan-penggalan sejarah kita sedikit menikmati kehidupan demokratis yang pro kebebasan atas pilihan rakyat. Sebab selebihnya rakyat memang hidup dalam hegemoni dan kooptasi rezim yang mengatasnamakan negara. Kekuasaan yang sentralistik, hukum yang dijadikan alat legitimasi politik untuk mempertahankan status quo, perekonomian yang dikuasai segelintir orang, militer yang tidak berpihak kepada rakyat, dan lainnya. Pada masa Orde Baru kaum perempuan Indonesia sebagaimana halnya warga Indonesia lainnya menjadi terkotak-kotak dari segi ideologis karena keanggotannya dalam berbagai organisasi yang berafiliasi dengan berbagai partai politik.

Sudut pandang yang muncul dari Pemerintah Orde Baru adalah situasi seperti ini tidak menguntungkan baik dari segi kepentingan perempuan sendiri maupun kepentingan pembangunan nasional. Terkotak-kotaknya perempuan dalam berbagai ormas perempuan telah membuat perempuan dinilai terlalu terlibat dalam perjuangan politik dan melupakan kegiatan lain yang langsung bermanfaat bagi pengembangan kesejahteraan hidup mereka. Keragaman ormas perempuan itu juga dinilai mengganggu kerukunan politik antar perempuan Indonesia. Inilah pola pandang Orde Baru. Pertimbangan politik rezim Orde Baru saat itu adalah mencegah agar perempuan menjadi alat bagi masuknya ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila. Pertimbangan inilah yang melatarbelakangi lahirnya ormas-ormas perempuan yang dibidani Pemerintah.<sup>2</sup> Maka di masa Orde Baru, gambaran posisi perempuan sangat transparan. Ada organisasi-organisasi seperti PKK, Dharma Wanita, yang secara khusus mengarahkan peran perempuan untuk mendukung target pembangunan. Salah satu contoh kasus di sini adalah program KB yang mengalkulasi kepatuhan tubuh perempuan untuk dipasang alat kontrasepsi. Organisasi Kowani yang semula merupakan pejuang-pejuang pioner isu-isu perempuan dibelokkan oleh negara untuk mendukung apa yang disebut Julia Suryakusuma sebagai ideologi Ibuisme.

Kecurigaan terhadap Orde Baru ini sangat beralasan. Sebab organisasi ini pada ujungnya berinduk kepada birokrasi dan tidak mempunyai kesempatan menjadi kekuatan lobi perempuan. Pimpinan organisasi perempuan di masa Orde Baru juga harus dikaitkan dengan struktur pimpinan dinas pemerintahan. Praktis, perempuan ideal di masa Orde Baru ditafsiri sebatas kelompok yang mendukung karier suami, menjadi ibu rumah tangga yang baik, dan melahirkan anak-anak bangsa.

---

<sup>1</sup> Loekman Soetrisno, *Perempuan, Kemiskinan, dan Pemberdayaan* (Jogjakarta: Kanisius, 1997), hal 61

<sup>2</sup> *Ibid*, hal 74

Kedudukannya sebagai warga negara tidak mendapatkan prioritas utama. Ruang publik yang tak ubahnya ruang privat. Sehingga jelas bahwa Orde Baru bersikap ganda; satu sisi memberikan ruang publik dengan membuka kesempatan perempuan masuk ke dalam pasar tenaga kerja upahan, dan kemampuan untuk bersaing dengan laki-laki. Sedangkan di sisi lain Orde Baru makin memperkuat sistem patriarkis dengan menempatkan perempuan sebagai penopang kesuksesan laki-laki. Padahal secara ideal Orde Baru seharusnya mendorong perkembangan suatu struktur patriarkis ke struktur keluarga egalitarian.

Kondisi yang sedemikian parahnya baru disadari oleh masyarakat Indonesia pada 1999 ketika memulai konsolidasi demokrasi. Konsolidasi ini ditandai adanya pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, luber dan demokratis serta meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat. Kelompok kepentingan adalah organisasi yang berusaha memajukan, mempertahankan atau mewakili sikap-sikap yang terbatas atau yang khas. Sedangkan partai politik berusaha memajukan, mempertahankan, atau mewakili spektrum yang lebih luas dari sikap.

Masa transisi ini menuntut peran serta semua elemen masyarakat untuk menyukseskan proses demokratisasi yang sedang berjalan. Aktivitas masyarakat di bidang sosial politik pun menjadi penting. Kemudian pada tahap inilah masyarakat mengambil peran dan berbeda-beda partisipasi sosial politiknya. Dari sudut pandang sistem politik, partai politik dan kelompok kepentingan dapat dinyatakan sebagai agen-agen mobilisasi politik.<sup>3</sup> Dua kelompok ini dapat mengambil bentuk-bentuk yang pasif dan aktif.

Kelompok potensial yang dapat mengambil peran-peran politik sebagai perwujudan partisipasi adalah perempuan. Arus gerakan perempuan mulai muncul menunjukkan penolakannya atas iklim sosial politik masa Orde Baru. Mereka bersuara menolak dan melawan kecenderungan kondisi yang menjadikan perempuan sebagai korban. Pada level organisasi-organisasi perempuan bentukuan Pemerintah terjadi debirokratisasi sebagai wujud keinginan tumbuhnya jiwa egalitarianisme sebagai dasar interaksi antara anggota dan masyarakat.

Gerakan Reformasi pada hari yang ditetapkan sebagai Siaga I, gerakan perempuan dari kelas menengah muncul di Jakarta. Mereka menamakan diri Suara Ibu Peduli dengan mengusung "Politik Susu", yaitu aksi kepedulian terhadap masyarakat yang terkena dampak krisis ekonomi sekaligus protes atas kebijakan Pemerintah yang gagal menyelamatkan perekonomian nasional. Berawal dari panggilan kemanusiaan dan kebutuhan untuk bertahan hidup melalui penjualan susu murah, gerakan Suara Ibu Peduli ini berujung pada penyadaran hak politik dan keterlibatan masyarakat basis untuk memecahkan berbagai masalah sosial yang ada di lingkungan mereka.

Politik bagi perempuan cukup penting mengingat relasinya dengan kekuasaan yang dapat dimanfaatkan untuk memperjuangkan kepentingannya. Maksud 'kepentingan perempuan' dalam hal ini adalah kepentingan berbasis gender, yaitu "keterwakilan politik: yaitu semakin banyaknya perempuan yang peduli terhadap

---

<sup>3</sup> Michael Rush and Philip Althoff, "an Introduction to Political Sociology", diterjemahkan oleh Kartini Kartono dengan judul, "Pengantar Sosiologi Politik" (Jakarta: Rajawali Pers, 2000) hal. 126

dunia politik dan memiliki kepekaan dan kesadaran tentang pentingnya hubungan-hubungan sosial, ekonomi, kebudayaan yang adil antara perempuan dan laki-laki. Sebagian aktivis beranggapan bahwa peningkatan jumlah perempuan yang terjun ke dunia politik mengakibatkan keterwakilan politik berbasis gender akan makin potensial terlayani. Karena perempuan sebagai pihak yang menjadi objek ketidakadilan lebih berpotensi memiliki kepekaan dan kesadaran gender dibanding laki-laki yang menjadi subjek dan pemetik keuntungan dari ketidakadilan itu. Jika memperhatikan sisi kuantitas perempuan Indonesia sebenarnya cukup untuk menunjukkan bahwa kelompok ini adalah kekuatan yang cukup signifikan dan memenuhi syarat untuk menjelma menjadi kekuatan besar di bidang politik. Dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 200 juta jiwa lebih, tercatat 50 % lebih adalah perempuan. Berarti kekuatan perempuan jika mampu dimobilisir secara maksimal akan menjadi penyeimbang yang cukup potensial. Kaum perempuan akan menjadi kekuatan riil, baik di tingkat elite maupun massa atau anggota. Meskipun dalam partisipasi politik satu tingkatan hirarki tidak menjadi prasyarat bagi partisipasi pada tingkatan yang lebih tinggi tetapi setidaknya kesinambungan partisipasi politik antara elite dan massa bawah adalah sebuah kekuatan yang cukup menakutkan.

Hanya saja untuk mewujudkan hal itu ternyata bukan persoalan mudah. Idealisasi partisipasi politik di kalangan perempuan Indonesia pada tataran praksis berhadapan dengan realitas bahwa jumlah perempuan potensial Indonesia tidak proporsional dengan jumlah keseluruhan perempuan. Data yang cukup baru menyebutkan bahwa jumlah penduduk kaum Hawa itu dengan rincian 39 % perempuan tidak sekolah, 13 % lulus sekolah lanjutan pertama (SLTP), dan kurang dari 5 % lulus perguruan tinggi. Angka-angka tersebut tentu masih jauh dari kondisi ideal. Bahkan kualitas pendidikan perempuan Indonesia ditempatkan sebagai yang terendah di ASEAN. *United Nations Children's Fund* (Unicef -salah satu badan PBB yang mengurus pendidikan) juga menuding Pemerintah Indonesia tidak serius menangani pendidikan perempuan.

Dr Muhammad Anis, direktur Pendidikan Universitas Indonesia, mempunyai catatan bahwa pada 1990-2001, perbandingan antara perempuan melek huruf dan laki-laki pada usia 15-24 tahun di negara-negara dengan indeks pembangunan rendah meningkat dari 70 orang menjadi 81 perempuan per 100 laki-laki. Meskipun di negara-negara dengan indeks pembangunan manusia medium hanya naik dari 91 menjadi 93. Rasio gender di tingkat pendidikan dasar juga mencapai kemajuan yang terbatas, yaitu naik dari 86 menjadi 92 anak perempuan per 100 anak laki-laki di negara berkembang pada 1990-2000. Dengan situasi seperti itu, kesetaraan gender di bidang pendidikan baru bisa dicapai pada 2025 atau 20 tahun dari target yang ditentukan.<sup>4</sup>

Sebuah catatan di Badan Statistik Pusat (BPS) pada 1995 menyatakan bahwa partisipasi perempuan dalam lembaga tinggi dan tertinggi negara sebesar 7,55% di MPR, 12,60% di DPR, 14,29% di MA, 6,67% di DPA dan tidak satu pun di BPK. Prosentase yang cukup kecil ini ternyata diperparah dengan kondisi dimana tidak semua partisipasi perempuan tersebut cermin dari kepekaan gender. Sekedar ilustrasi, pada tahun 1996, *The Asia Foundation* dan *Harian Republika* mengadakan sebuah penelitian yang menjadikan 104 dari 118 orang (88,14 % populasi) perempuan anggota DPR Pusat dan DPRD DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan

---

<sup>4</sup> Jawa Pos, Jumat, 26 Des 2003.

Sumatera Utara sebagai responden. Hasilnya, umumnya perempuan anggota parlemen itu ternyata hanya berjenis kelamin perempuan tanpa kesadaran gender.

Pemilu 1999 yang dianggap sebagai pemilu yang demokratis jika dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya yang pernah digelar oleh Orde baru, juga masih menghasilkan keterwakilan perempuan yang tidak proporsional di parlemen, yaitu 9,8% dari 52% pemilih perempuan, di samping juga tanpa jaminan kesetaraan gender. Sesungguhnya Pemilu 2004 merupakan masa-masa awal perjuangan bagi keterwakilan politik berbasis gender. Realitas ini menunjukkan bahwa eklusi perempuan Indonesia di bidang sosial politik berada di titik suram.

Peta ketimpangan gender di atas merupakan keterkaitan dari *empat faktor*; konstruksi sosial dari gender, divisi tenaga kerja gender, doktrin dan praktik ruang publik dan privat, serta ideologi patriarkis. Divisi seksual tenaga kerja dalam masyarakat modern membagi produksi dari gender dan ruang (*sphere*) yang disebut ruang publik dan privat. Perempuan diberi tugas utama untuk ruang privat, sedangkan laki-laki diberi akses istimewa ke ruang publik. Padahal ruang publik merupakan lokus dari imbalan kehidupan sosial yang sesungguhnya; uang, kekuasaan, status, kebebasan, peluang untuk tumbuh dan berkembang.<sup>5</sup> Maka ketertinggalan perempuan ini harus dijawab oleh perempuan sendiri. Kesadaran akan ketertinggalan ini sebenarnya telah menumbuhkan gerakan menuju kesetaraan gender.

Hanya saja gerakan perempuan tersebut mengalami kebingungan langkah-langkah praksis dan orientasi. Sehingga apa yang mereka lakukan sulit dipahami oleh internal perempuan itu sendiri bahkan banyak yang cenderung salah mengerti. Maka untuk menarik perempuan ke pusat pergerakan dan mobilitas sosial politik di level nasional, perempuan harus memulai dengan langkah-langkah praksis dan berorientasi jelas. Dalam konteks ini, apakah yang harus dilakukan kaum perempuan dan kelompok gerakan kesetaraan gender di Indonesia.

### **Menuju Ruang Publik**

Sebuah hasil penelitian di Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan tahun 2000 tentang Identifikasi Pelaku Penting Pembangunan di Kabupaten/Kota menunjukkan bahwa perempuan yang berada di pedesaan mengalami domestifikasi permanen. Hampir 80% perempuan di pedesaan tidak mampu bersaing dengan laki-laki dalam semua aspek kehidupan. Keterbatasan jumlah perempuan sebagai pengambil keputusan (*decision maker*) mempengaruhi tingkat kepekaannya terhadap kepentingan perempuan. Berarti proses demokratisasi tidak berjalan dengan baik. Ketidakwajaran ini perlu dikoreksi. Sehingga proses pemberdayaan perempuan sebagai bagian dari gerakan partisipasi seluruh warga merupakan koreksi perempuan terhadap konsep demokratisasi dan masyarakat sipil yang bias gender.

Kondisi di atas perlu perjuangan panjang. Menurut Saparinah Sadli, aktivis HAM Perempuan, bahwa pada saat ini gerakan perempuan di Indonesia tengah memasuki babak ketiga dalam sejarah perkembangannya. Periode nasionalisme dan periode Orde Baru telah menempatkan perempuan sebagai kelompok yang memperjuangkan kepentingan bangsa atau negara bahkan pada periode yang terakhir

---

<sup>5</sup> George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal 422

tersebut, dikooptasi untuk kepentingan penguasa. Pada lima tahun terakhir inilah gerakan perempuan Indonesia mulai berjuang dengan perspektif khusus menyuarakan kepentingan dan visi perempuan.

Proses domestifikasi yang terus menerus tersebut merupakan akibat dari ketimpangan gender. Maka perempuan bisa mengklaim kesamaan dengan laki-laki atas dasar kapasitas esensial manusia sebagai agen moral yang bernalar, bahwa ketimpangan gender adalah akibat dari pola seksis dan patriarkis dari divisi kerja, dan bahwa kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengubah divisi kerja melalui pemolaan ulang institusi-institusi kunci—hukum, pekerjaan, keluarga, pendidikan, dan media. Kesamaan gender ini berdasarkan pada keyakinan bahwa semua manusia mempunyai ciri esensial tertentu, kapasitas sebagai agen moral dan nalar dan aktualisasi diri. Sedangkan pelaksanaan kapasitas ini dapat dijamin melalui pengakuan legal atas hak-hak universal. Di samping itu ketimpangan laki-laki dan perempuan adalah diciptakan secara sosial (*social constructed*) dan tidak mempunyai landasan “alam”.<sup>6</sup>

Kesamaan gender dapat dicapai melalui proses perubahan sosial dengan mengajak publik yang rasional dan dengan menggunakan negara. Dalam konteks intervensi negara, bentuk ideal intervensi itu adalah melindungi kebebasan sipil, misalnya hak milik, hak memilih, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan untuk berbeda, kebebasan berserikat. Alih-alih melakukan campur tangan dengan pasar bebas, negara juga memberikan semua individu kesempatan yang setara, untuk menentukan akumulasinya sendiri di dalam pasar tersebut.<sup>7</sup> Negara juga berperan memberikan perlindungan serta jaminan atas berlangsungnya hukum, pekerjaan, keluarga, pendidikan, dan media, yang tidak bias gender. Sedangkan dalam wilayah privat (keluarga atau masyarakat domestik), intervensi negara disetujui sekecil mungkin, bahwa semakin kurang wilayah privat berhadapan dengan *Big Brother* (penguasa) di kamar tidur, kamar mandi, dapur, ruang rekreasi, adalah semakin baik. setiap manusia membutuhkan tempat yang memungkinkan untuk melepaskan persona publiknya dan menjadi dirinya sendiri secara sungguh-sungguh.<sup>8</sup>

Beberapa momentum politik kontemporer dalam hal ini dapat dijadikan rujukan. Seperti langkah politik kekuasaan “kebijakan satu pintu” (*one gate policy*), yaitu upaya koordinasi kegiatan sensitif gender gagasan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI. Contoh lainnya adalah ketegasan Departemen tersebut yang menolak substansi UU Perkawinan tentang Poligami, pembelaan hak-hak buruh perempuan yang dianiaya di luar negeri, pemberlakuan kuota perempuan dalam berbagai jabatan publik, baik legislatif maupun eksekutif, serta pembelaan terhadap siswi hamil untuk tetap bisa melaksanakan tugas belajar.<sup>9</sup>

Konteks memperjuangkan kesetaraan gender, pendidikan memainkan peranan penting. Melalui pendidikan pemberdayaan hak maka struktur sistem bisa disingkap, ditantang dan ditekan agar menjadi responsif terhadap masalah-masalah gender. Perubahan undang-undang atau kebijakan negara yang menguntungkan perempuan

---

<sup>6</sup> Ibid. hal 421

<sup>7</sup> Rosemarie Putnam Tong, “Feminist Thought”, *terj* (Bandung: Jalasutra, 1998), hal 16-17

<sup>8</sup> Ibid, hal 16

<sup>9</sup> Tari Siwi Utami, “Perempuan Politik di Parlemen”, (Surabaya, Duta M, 2002), hal. 36

memang memberikan andil terhadap kesetaraan gender, tetapi yang dominan adalah proses dimana perempuan mengaktifkan hak-hak yang mereka miliki dan usaha mereka untuk mendefinisikan dan membentuk kembali undang-undang dengan standar kesetaraan gender sebagai hasil dari pendidikan perempuan.

Pendidikan sebagai proses pengembangan nalar berkaitan dengan pembentukan moral. Karena itu Mary Wollstonecraft menentang pendapat bahwa perempuan, secara alamiah, lebih cenderung untuk bersifat sebagai pemburu dan pemberi kenikmatan daripada laki-laki. Ia berargumentasi bahwa jika laki-laki disimpan di dalam sangkar yang sama seperti perempuan dikurung, laki-laki pun akan mengembangkan sifat sama dengan perempuan. Karena diabaikan kesempatannya untuk mengembangkan kekuatan nalarnya, untuk menjadi manusia bermoral dengan perhatian, motif dan komitmen yang lebih dari sekedar kenikmatan pribadi, laki-laki, seperti juga perempuan, akan menjadi sangat emosional. Karena secara umum penilaiannya yang negatif atas emosi dan penilaian yang sangat tinggi atas nalar sebagai kapasitas yang membedakan manusia dengan binatang.<sup>10</sup> Maka negara dapat memberikan jaminan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh pendidikan.

Pendidikan merupakan sektor yang netral sebagaimana ilmu pengetahuan yang bebas dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan. Masyarakat wajib memberikan pendidikan kepada perempuan, seperti juga kepada anak laki-laki, karena semua manusia berhak mendapatkan kesempatan yang setara untuk mengembangkan kapasitas nalar dan moralnya.<sup>11</sup> Sehingga mereka dapat menjadi manusia utuh. Netralitas pendidikan ini harus diyakini mengingat proses pendidikan sering merugikan perempuan. Sebagai contoh, studi Hall dan Sandler (1982) yang menemukan bahwa staf pengajar lembaga pendidikan lebih mungkin menghargai gagasan-gagasan laki-laki, lebih memperhatikan laki-laki, dan membiarkan perempuan "tertekan keluar" dari pertunjukan-pertunjukan laboratorium. Perempuan juga dikeluarkan dari aktivitas pendidikan yang bersifat "lapangan" karena dianggap "terlalu menyusahkan".<sup>12</sup>

Persoalan-persoalan teknis ini harus diselesaikan sehingga pendidikan kembali netral dan dapat berperan sebagai wahana yang ampuh untuk menyetarakan gender. Melalui pendidikan, selain memperoleh kepandaian berupa keterampilan berolah pikir, perempuan juga memperoleh wawasan baru. Karena itu aneka ragam kegiatan pendidikan diperlukan untuk mencapai personal perempuan yang mempunyai kemampuan untuk memainkan peranan penting di sektor publik. Sehingga intelektual perempuan pada taraf tertentu tidak hanya berurusan dengan persoalan perempuan, tetapi membawa perspektif perempuan untuk berekspresi di tengah persoalan bangsa dan negara.

Persoalan dilematis perempuan di antara ruang privat dan ruang publik juga harus diselesaikan. Di sektor ruang publik, peran perempuan masih dikaitkan dengan aktivitas perempuan di ruang privat seperti perawatan, manajemen emosi, pemeliharaan rutinitas dan ketertiban. Kondisi ini memberikan implikasi dua sisi yang

---

<sup>10</sup> Rosemarie, *op.cit.* hal 19

<sup>11</sup> *Ibid*, hal 21

<sup>12</sup> Jane C. Ollenburger dan Helen A. Moore, "A Sociology of Woman" diterjemahkan dengan judul, "Sosiologi Wanita" (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) hal 156-157.

berlawanan. Satu sisi menjadikan gerakan sosial politik perempuan bervisi khas perempuan; menghadirkan gerakan damai di tengah sosial politik kekerasan, menawarkan gerakan lintas kelompok di hadapan politik kekuasaan, mengajukan politik bermoral di tengah kekisruhan partai politik. Sedangkan di sisi lain kondisi itu menimbulkan sistem upah yang rendah dimana keahlian perempuan dikomodifikasi dan dipasarkan. Pola kerja patriarkis ini menempatkan perempuan sebagai ibu, perempuan yang menjaga rumah dan anak-anak tanpa pertolongan dari laki-laki, dengan resiko perempuan kehilangan sumber ekonominya sendiri.<sup>13</sup> Pada level ini negara perlu memperbaiki sistem upah rendah.

Begitu juga dunia media massa yang sangat efektif untuk mempengaruhi pendapat masyarakat. Tidak ada yang bisa menandingi peliputan media massa yang positif sebagai alat untuk menyebarkan isu, membawa pesan keluar dan mempengaruhi pembuat kebijakan serta masyarakat umum. Pendapat masyarakat yang dididik oleh laporan media tersebut dapat menjadi alat yang kuat untuk memaksa kelompok-kelompok manapun agar memberikan ruang kesetaraan gender. Strategi media berbeda-beda kecanggihannya dari yang minimal (misalnya satu atau dua konferensi pers yang mengumumkan usaha kesetaraan gender) sampai kampanye besar-besaran yang meliputi pemakaian sebuah kantor hubungan media massa dan hubungan dengan media dalam negeri dan luar negeri secara kontinyu.<sup>14</sup> Negara juga dapat berperan dalam menentukan kebijakan makro berkaitan dengan kesetaraan gender di media.

### **Politik Sebagai Ruang Publik Potensial**

Umumnya politik disebut sebagai ragam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. pengambilan keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih. Untuk melaksanakan tujuan itu memerlukan kebijaksanaan umum (*public policies*) yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau alokasi dari sumber-sumber dan resources yang ada.

Melaksanakan kebijaksanaan itu memerlukan kekuasaan dan kewenangan yang akan dipakai baik untuk membina kerja sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Cara-cara yang dipakai dapat bersifat persuasi dan jika perlu ditempuh cara represif. Tanpa unsur paksaan kebijaksanaan ini hanya merupakan perumusan keinginan belaka. Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat, termasuk perempuan. Politik bukan untuk merealisasikan tujuan pribadi. Politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok termasuk partai politik dan organisasi keperempuanan.<sup>15</sup> Esensi politik yang strategis ini merupakan salah satu faktor kebijakan beberapa rezim pemerintahan yang menutup rapat-rapat kesempatan berpolitik bagi warga negaranya. Politik menjadi monopoli penguasa dan selanjutnya digunakan untuk melanggengkan kekuasaannya.

---

<sup>13</sup> Ritzer, *op.cit.* hal 423

<sup>14</sup> Lebih jauh lihat, HAM Kaum Perempuan (Jakarta: Sinar Harapan, 2001), hal 164

<sup>15</sup> Miriam Budiardjo, "Dasar-Dasar Ilmu Politik" (Jakarta: Gramedia, 1992), hal 8



Hal ini kemudian timbul langkah-langkah politik penguasa yang bersifat memasung dan mengerdilkan *civil society*.

Depolitisasi kaum perempuan dan ormas-ormas perempuan di Indonesia pada masa Orde Baru adalah salah satu ketakutan pemerintah terhadap partisipasi politik warganya. Maka depolitisasi itu pun menjadikan kelompok perempuan sebagai makhluk dan organisasi bagian dari Pemerintah. Akibatnya di Indonesia saat ini jarang ditemukan gerakan perempuan yang benar-benar mandiri, kuat dan efektif dalam memperjuangkan kepentingan perempuan. Perempuan Indonesia kesulitan menemukan organisasi perempuan yang dapat berfungsi sebagai *policy advocacy* terhadap permasalahan perempuan. Organisasi perempuan tidak dapat berbuat banyak menghadapi kasus-kasus perkosaan, buruh perempuan, TKW, pelecehan seksual, dan lainnya. Dalam situasi dimana gerakan perempuan kehilangan otonominya tidak dapat dielakkan munculnya kritik yang mengatakan bahwa pada saat ini terjadi kemunduran pada organisasi perempuan Indonesia.

Permasalahan yang dihadapi perempuan Indonesia memang sangat kompleks dan hanya dapat dipecahkan apabila kaum perempuan dapat melakukan gerakan secara sistematis yang secara mandiri mampu berfungsi sebagai kekuatan lobi yang efektif, baik pada tingkat nasional maupun lokal. Dalam konteks ini dunia politik sangat berpotensi mewujudkan cita-cita kesetaraan gender.

Politik itu berkaitan dengan kebijakan. Sedangkan merumuskan kebijakan bukanlah masalah sederhana karena para pengambil kebijakan itu tidak terlepas dari pengaruh berbagai kepentingan yang ada, baik kepentingan pribadi, kerabat, patron, serta kepentingan masyarakat luas; baik kepentingan ekonomi, politik, prestise, ataukah kepentingan lainnya yang lebih kompleks. Idealnya perumusan kebijakan harus didasarkan pada pertimbangan rasionalitas dan terbebas dari *vested interest* tertentu dalam masyarakat para pengambil kebijakan itu sendiri. Sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan atau mewakili keinginan dan kepentingan serta kebutuhan masyarakat luas dan bukan orang perorangan atau kelompok orang tertentu saja. Praktiknya memang tidak sesederhana itu, karena suatu kebijakan tidaklah dirumuskan benar-benar steril dari berbagai kepentingan. Untuk itu yang dapat dilakukan adalah bukanya menghilangkan sama sekali berbagai pengaruh tersebut, tetapi mengeliminasi sekecil mungkin.<sup>15</sup>

Melihat faktor kepentingan yang terkait dengan proses perumusan kebijakan tersebut maka cara yang lebih mudah memahami proses perumusan kebijakan dapat dilakukan dengan menggunakan model-model pendekatan yang telah dibangun oleh berbagai ahli di bidang politik, terutama yang mengkhususkan diri pada pemahaman tentang bagaimana suatu kebijakan tertentu dirumuskan dalam suatu pemerintah. Karenanya politik mempunyai kemampuan merumuskan kebijakan dalam sistem pemerintahan. Sistem politik tidak lain adalah negara dengan segala aktivitasnya, yaitu meliputi berfungsinya struktur politik dan berlangsungnya proses politik. Jika itu memang negara, mengapa seteraan gender dapat diperjuangkan melalui sistem politik? karena konsep negara mengandung pengertian statis. Negara hanya terdiri dari *empat unsur*, yaitu wilayah, penduduk, pemerintahan, dan kedaulatan. Dengan

---

<sup>15</sup> Drs. Ng. Philipus, M.Si dan Dr. Nurul Aini, MS., "Sosiologi dan Politik (Jakarta: Grafindo, 2004), hal 153-154.

konsep sistem politik, perempuan dapat memilah-milah perbedaan serta fungsi politik serta bagaimana proses politik itu berlangsung.

Hal inilah yang menjanjikan bahwa kesetaraan gender di bidang politik memberikan keleluasaan perempuan untuk memperjuangkan kepentingannya secara terstruktur. Dalam hal ini terdapat dua jalur struktur yang dapat dioptimalkan; *pertama*, suprastruktur atau disebut juga *the ruler* (penguasa), yang terdiri dari lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sedangkan infrastruktur atau *the ruled* adalah masyarakat beserta organisasi yang dibentuknya. Yang termasuk infrastruktur politik adalah partai politik/organisasi politik, ormas, pers, kelompok kepentingan, kelompok penekan, asosiasi-asosiasi, LSM, dan informal leader.<sup>16</sup>

John Stuart Mill dan Harriet Taylor Mill yakin bahwa perempuan harus memiliki hak pilih agar dapat menjadi setara dengan laki-laki. Dapat memilih, menurut keduanya, berarti berada pada posisi tidak saja untuk mengekspresikan pandangan politik personal seseorang, tetapi juga untuk mengganti sistem, struktur dan sikap yang memberikan kontribusi terhadap opresi orang lain, atau opresi terhadap diri sendiri. Sebagai contoh, di Amerika Serikat seluruh gerakan perempuan abad ke-19, termasuk gerakan perempuan untuk memperoleh hak pilih, secara sangat dekat bertalian dengan gerakan abolisi (penghapusan diskriminasi terhadap kulit hitam).<sup>17</sup>

Arus besar kaum perempuan memang masih bersikap *apati, sinis, alienasi, dan anomie* terhadap dunia politik. Morris Rosenberg<sup>18</sup> mensugestikan *tiga alasan pokok* untuk menerangkan apati politik, *pertama*, konsekuensi atas aktivitas politik. Pelaku politik merasa bahwa aktivitas politik merupakan ancaman terhadap berbagai aspek hidupnya. Misalnya, mempercayai bahwa aktivitas politik dapat mengasingkan kawan dan para tetangganya. *Kedua*, anggapan bahwa aktivitas politik sebagai sia-sia. Pelaku politik merasa tidak mampu mempengaruhi jalannya peristiwa dan bahwa kekuatan politik berada di luar individu. Pada akhirnya ia merasa ada jurang antara idealisasi dengan realitas politik. *Ketiga*, seperti Milbrath, Rosenberg beranggapan bahwa memacu diri untuk bertindak atau perangsang politik adalah faktor penting untuk mendorong aktivitas politik; dengan tidak adanya perangsang sedemikian itu dapat menambahkan perasaan apati.

Pendidikan sebagai basis gerakan kesetaraan gender di bidang politik membuka peluang bagi peran serta perempuan dalam peningkatan kualitas demokrasi dengan aktif di bidang politik. Aktifitas perempuan di bidang politik adalah pemenuhan komposisi perempuan secara proporsional sebagai syarat sebuah demokrasi. Sisi krusial dunia politik bagi perempuan tidak hanya pada hirarki yang paling tinggi, tetapi juga yang terendah. Hal ini mengingat bias gender telah terjadi di semua level lini kehidupan. Kekuatan tekan politik dapat menghancurkan sistem patriarkal sehingga memaksa kaum laki-laki menghormati dan menyadari hak-hak perempuan. Kesadaran ini kemudian akan membentuk manusia baru di mana laki-laki dan perempuan bekerja sama atas dasar persamarataan.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 104-105

<sup>17</sup> Rosemarie, *op.cit.* hal 30

<sup>18</sup> Morris Rosenberg, "Some Determinants of Political Apathy", sebagaimana dikutip Michael Rush, *op.cit.* hal. 146.

Politik juga dapat dijadikan instrumen untuk menuntut pembaruan hukum yang tidak menguntungkan perempuan dan mengubah hukum ini menjadi peraturan-peraturan baru yang memperlakukan perempuan secara sama rata dengan laki-laki. Politik akan semakin efektif dijadikan instrumen gerakan mengingat perjuangan kesetaraan gender membutuhkan gerakan yang sederhana, praksis, nyata, mudah dipahami dan mempunyai sasaran yang jelas.<sup>19</sup>

Sebagai tindak lanjut meningkatkan partisipasi politik perempuan perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut; *pertama*, memperkuat partisipasi perempuan di dunia politik (baca: partai politik) sebagai manifestasi proses demokratisasi. Perempuan yang aktif di partai politik secara otomatis ikut aktif meletakkan dasar-dasar fundamental sebuah demokrasi yang tidak bias gender. Partai politik dapat memainkan perannya dalam proses demokratisasi berbagai institusi politik, antara lain pada anggota partai yang menjadi anggota parlemen, kelompok-kelompok politik pendukungnya (*core supporters*), dan juga dapat memainkan regulasi kekuasaan pemerintahan. Posisi strategis inilah yang menjadikan partai politik sebagai pemain kunci dalam proses demokratisasi dan wahana strategis bagi proses agregasi dan segregasi politik perempuan melalui perannya dalam pengambilan keputusan strategis partai. *Kedua*, keterlibatan perempuan dalam dunia politik harus dengan *affirmatif action*. Perempuan memerlukan kuota yang mengharuskan perempuan dilibatkan dalam aktivitas politik. Hal ini dinilai penting secara struktural tidak ada lagi yang menghambat perempuan terjun di kehidupan politik.

Berbagai problem yang menghambat partisipasi perempuan di dunia politik sebenarnya tidak hanya dihadapi oleh perempuan saja. Karena itu problem tersebut tidak harus memunculkan sikap pesimistis. Perempuan memerlukan proses transisi yang melibatkan seluruh komponen masyarakat. Perempuan juga membutuhkan kesadaran kolektif bahwa partisipasi politik kaum perempuan bukanlah sebuah ancaman bagi komunitas lain melainkan sebagai sebuah peluang beraktualisasi secara total.

## PENUTUP

Batasan-batasan budaya yang dimunculkan untuk perempuan seringkali berimbas pada kekurangleluasaan perempuan untuk berekspresi dan beraksi. Kita sering menyaksikan realitas perempuan Indonesia dimana di satu pihak dituntut untuk meningkatkan peranan mereka di ruang publik sebagai pemeran utama, namun ruang publik itu sendiri terkadang masih belum ramah terhadap perempuan. Karena itu perkembangan nalar perempuan dengan pendidikan sangat diperlukan untuk menopang kesetaraan gender. Spesifikasi pemenuhan perkembangan nalar perempuan sebagai basis gerakan kesetaraan gender telah menggerakkan reformasi di bidang hukum dan pendidikan sehingga kualitas perempuan semakin baik dan maju.

Perjuangan kesetaraan gender dengan titik tekan pendidikan ini mungkin mempunyai "masa depan yang radikal" menurut perkiraan Elshain. Dengan segala keterbatasannya, kekuatan gerakan ini tidak bisa disangkal. Pada saat sekarang ini begitu banyak perempuan aktif yang dapat mencapai posisi profesional dan posisi

---

<sup>19</sup> Baca, Arief Budiman, "Pembagian Kerja secara Seksual," (Jakarta: PT Gramedia, 1981), hal 41-42.

kerja yang tinggi. Meskipun demikian pekerjaan ini belum selesai selama perempuan masih belum dipastikan mendapatkan pendidikan, hukum, dan profesi/pekerjaan.

Sedangkan dunia politik merupakan pilihan yang cukup rasional dalam tataran kerja-kerja praksis strategis upaya mewujudkan kesetaraan gender. John Stuart Mill dan Harriet Taylor berkeyakinan bahwa jika masyarakat ingin mencapai kesetaraan seksual, keadilan gender maka masyarakat harus memberikan perempuan hak politik dan kesempatan, serta pendidikan yang sama sebagaimana dinikmati laki-laki.<sup>20</sup> Sedangkan dalam tataran fungsi, sistem politik mempunyai fungsi input dimana hal ini dilakukan oleh infrastruktur politik yang meliputi kerja-kerja sosialisasi, dan perempuan adalah aktor idealis dalam pelaksanaan fungsi-fungsi politik tersebut sampai tahap akhir politik.

#### REFERENSI

- Budiman, Arief, 1981. Pembagian Kerja secara Seksual. Jakarta: PT Gramedia.  
Budiardjo, Miriam, 1992. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.
- HAM Kaum Perempuan.2001. Jakarta: Sinar Harapan.
- Jawa Pos: Jumat, 26 Des 2003
- Ng. Philipus, Aini, Nurul, 2004. Sosiologi dan Politik. Jakarta: Grafindo.
- Ollenburger, Jane C. dan Helen A. Moore, 2002. A Sociology of Woman” diterjemahkan dengan judul, “Sosiologi Wanita. Jakarta: Rineka Cipta.
- Putnam Tong, Rosemarie,1998. Feminist Thought, Bandung: Jalasutra.
- Ritzer, George, 2004. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Prenada Media.
- Rush, Michael and Philip Althoff, 2000. An Introduction to Political Sociology. diterjemahkan oleh Kartini Kartono dengan judul, Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soetrisno, Loekman, 1997. Perempuan, Kemiskinan, dan Pemberdayaan. Jogjakarta: Kanisius.
- Utami, Tari Siwi, 2002. Perempuan Politik di Parlemen. Surabaya: Duta M.

---

<sup>20</sup> Rosemarie, *op.cit.* hal 23